

PROCEEDINGS

SIMPOSIUM NASIONAL

DALAM TEMU ILMIAH NASIONAL (TEMILNAS) 2014

FORUM SILATURRAHIM STUDI EKONOMI ISLAM



Malang, 27 - 30 Maret 2014

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang 65145



KAAN
ANSI/FEB
JAHAN MALANG

Diterbitkan atas kerjasama
Universitas Negeri Malang
dengan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang



PROCEEDING

SIMPOSIUM NASIONAL
DALAM TEMU ILMIAH NASIONAL 2014
FORUM SILATURRAHIM STUDI EKONOMI ISLAM (FoSSEI)

Implementasi Ekonomi Islam dalam Sektor Agraria untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia



diselenggarakan oleh:
KSEI ICON & KSEI LiSEI
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



bekerjasama dengan
KSEI CIES, Universitas Brawijaya
KSEI FPED, Universitas Muhammadiyah Malang
KSEI Himaesy, Universitas Yudharta Pasuruan
FoSSEI Regional Jawa Timur

Diterbitkan atas kerjasama
Universitas Negeri Malang
dengan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang



PROCEEDING
Simposium Nasional
Dalam Temu Ilmiah Nasional 2014, FoSSEI

v, 89 hlm; 29,7 cm

ISBN: 978.979.495.749.3

Panitia Simposium, Temu Ilmiah Nasional 2014 FoSSEI

Tim Reviewer Simposium : Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo, M.M
Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M
Dr. Heri Pratikto, M.Si
Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si
Ketua Pelaksana : Ahmad Zakaria
Wakil Ketua Pelaksana : M. Tolibul Arif
Sekretaris Pelaksana : Devy Krisnawati
Nur Naili Mawaddah
Bendahara Pelaksana : Sely Puspita Sari
Maulidya Prasadena

Editor : Hj. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M
Layout : Tita
Cover Design : Committee designer

Hak cipta yang dilindungi:

Undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Universitas Negeri Malang
Dicetak oleh : Universitas Negeri Malang

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Universitas Negeri Malang
d/h IKIP Malang, Anggota IKAPI No. 059/JTI/89
Jl. Semarang 5 (Jl. Gombong 1) Malang, Kode Pos 65145
Kotak Pos 13, MLG/IKIP Telp. (0341) 553959, 562391, 551312
(4 saluran) psw. 453; Faks. (0341) 566025

Kata Pengantar

Proceeding ini disusun berdasarkan hasil Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) dengan tema "Implementasi Ekonomi Islam Dalam Sektor Agraria untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia" yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 30 Maret 2014 di Universitas Negeri Malang. Secara umum, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ilmu ekonomi islam, berbagi pengetahuan dan pengalaman sesama akademisi, praktisi, birokrat dan usahawan yang sering mengkaji ilmu ekonomi islam. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan menjangir ide mengimplementasikan ekonomi islam dalam bidang pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Beberapa makalah yang terkait dengan hal tersebut meliputi program kredit pertanian di Indonesia dan peluang skema kredit pertanian syariah; Kebijakan ekspor-impor Ubi Kayu terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunung Kidul dalam Perspektif ekonomi Islam; Manajemen Ketahanan Pangan di Indonesia: Telaah atas Q.S Yusuf 47-49. Implementasi Ekonomi Islam dalam sektor agraria untuk kemandirian ekonomi Indonesia; serta makalah yang terkait dengan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan lainnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Drs. Djoko Dwi Kusumojanto, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, yang telah membimbing dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.

Selanjutnya kepada para penulis, penyaji makalah dan editor serta pelaksana Telminas ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga Telminas ini dapat berlangsung dengan baik hingga tersusunnya proceeding ini.

Akhir kata, semoga proceeding ini bermanfaat khususnya bagi pemerhati ekonomi islam, pertanian dan ketahanan pangan.

Malang, 22 Juli 2014
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si

Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| MAKALAH-MAKALAH/SLIDE: | |
| 1. Program Kredit Pertanian di Indonesia dan Peluang Skema Kredit Pertanian Syariah <i>Oleh: Bintang Ulfatuz Zakiya, Sebastian Herman.....</i> | 1 |
| 2. Pengaruh Nilai Produksi Pertanian Ubi Kayu terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat <i>Oleh: Deni Iswandi.....</i> | 15 |
| 3. Kebijakan Ekspor-Impor Ubi Kayu terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunung Kidul dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pendekatan <i>Theory of Production</i>) <i>Oleh: Apriliana Ika Kusumanisita, Muhammad Abdul Aziz.....</i> | 25 |
| 4. Studi Prokontra Pengembangan Teknologi Agraris dalam Upaya Ketahanan Pangan Indonesia <i>Oleh: Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Regional Sulawesi Selatan.....</i> | 35 |
| 5. Manajemen Ketahanan Pangan di Indonesia: Telaah Atas Q.S. Yusuf 47–49 <i>Oleh: Sulisty, Fauzan</i> | 40 |
| 6. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Jawa Timur <i>Oleh: Bambang Banu Siswoyo</i> | 46 |
| 7. "Persaingan Usaha Vertikal"; Sebuah Gagasan Awal Desain Kelembagaan Kontrak yang Lebih Adil (<i>Just PRICE</i>) <i>Oleh: Asfi Manzilati.....</i> | 52 |
| 8. Kebutuhan Beras sebagai Sumber Pangan dan Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian <i>Oleh: Madziatul Churiyah</i> | 61 |
| 9. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Ketela Pohon (Ubi Kayu) sebagai Bahan Baku Tepung Tapioka <i>Oleh: M. Fatchurrohman, Ahmad Ulin Nuha, Noor Ahmad Toyib.....</i> | 72 |
| 10. Implementasi Ekonomi Islam dalam Sektor Agraria untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia <i>Oleh: Muhammad Nizar</i> | 78 |
| 11. Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang di Kawasan Kalimantan Timur <i>Oleh: Romayah.....</i> | 82 |
| 12. Revitalisasi Peran Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) dan Sistem Resi Gudang (SRG) Mikro untuk Meningkatkan Harga Jual Hasil Panen Berbasis Syariah <i>Oleh: Departemen Riset FoSSEI Nasional</i> | 85 |
| 13. Iqtha: Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Dijadikan Lahan Produktif dengan Produk Pertanian Unggul <i>Oleh: Syujai, Irnawati.....</i> | 87 |

Manajemen Ketahanan Pangan di Indonesia: Telaah Atas Q.S. Yusuf 47–49

Sulistyo¹, Fauzan²

¹Universitas Kanjuruhan Malang

²Universitas Kanjuruhan Malang

E-mail: phibinusi@yahoo.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen ketahanan pangan di Indonesia sebagai hasil telaah atas ajaran-ajaran al-Qur'an khususnya Q.S. Yusuf ayat 47–49. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti. Materi yang dikaji adalah QS. Yusuf ayat 47–49. Hasil dari kajian yang telah dilakukan ditemukan bahwa QS. Yusuf ayat 47–49 erat kaitannya dengan manajemen ketahanan pangan yang diterapkan di Indonesia. Implementasi ajaran al-Qur'an khususnya Q.S. Yusuf ayat 47–49 menjadi model dari manajemen ketahanan pangan.

Kata Kunci: manajemen, pangan, ketahanan pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan dasar manusia. Tata pangan di Indonesia yang melibatkan produsen, konsumen, distributor, pengimpor, dan pengeksport, dari waktu ke waktu diatur dengan berbagai bentuk, mulai dari pengaturan lokal tradisional sampai pengaturan nasional hukum positif. Masing-masing aturan tersebut memiliki konsekuensi dan implikasi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik positif maupun negatif. Aturan tata pangan di Indonesia melibatkan konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan (Hermawan, 2012).

Krisis pangan merupakan masalah bagi kehidupan manusia, karena hak pangan merupakan salah satu pilar keamanan bagi kehidupan manusia. Hak atas pangan merupakan salah satu elemen hak asasi manusia, artinya hak atas pangan merupakan hak universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena kodrat dan kelahirannya sebagai manusia (Astuti, 2008). Konsekuensi hak atas pangan sebagai hak universal adalah bahwa pemenuhan atas kebutuhan pangan harus dipenuhi tanpa memperdulikan suku, agama, jenis kelamin, dan latar belakang kultural seseorang. Dan implikasi dari kodrat serta kelahiran manusia, bahwa hak atas pangan tidak boleh dirampas oleh siapapun dengan atas nama apapun.

Ketakutan atas bencana krisis pangan, seperti kelaparan, kurang gizi, busung lapar, dan lain-lain merupakan bencana kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan. Kenyataan busung lapar dan gizi buruk yang menimpa anak-anak Indonesia merupakan kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian, bagaimana manajemen pangan di Indonesia perlu diterapkan, sehingga hak asasi dari setiap anak kepada standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak dapat terpenuhi.

Kegelisahan akan krisis pangan di Indonesia didukung oleh semakin berkembangnya jumlah penduduk yang terus bertambah ibarat deret ukur, sedangkan kemampuan memproduksi pangan berkembang layaknya deret hitung. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan kemampuan produksi pangan bisa dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Indonesia dari 1930–2051 yang diperkirakan mencapai 322 juta jiwa, sementara tahun 2014 sudah mencapai 240 juta jiwa (Margino, 2004).

Krisis pangan tidak hanya menimpa Indonesia, tapi juga negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. India merupakan salah satu negara dengan jumlah kelaparan tertinggi di dunia, kemudian disusul oleh China. Sebanyak 60% dari penderita kelaparan di seluruh dunia berada di Asia dan

Pasifik, 24% berada di negara Sahara dan Afrika, 6% berada di negara Amerika dan Karibia. Jumlah penderita kelaparan setiap tahun meningkat hingga 5,4 juta, dan setiap tahun sebanyak 36 juta orang meninggal akibat kelaparan baik secara langsung maupun tidak langsung (Rosario, 2007).

Indonesia di tahun 1984 pernah menjadi negara swasembada beras, dengan menjadikan pembangunan sektor pertanian sebagai skala prioritas. Pemerintah saat itu meyakini bahwa stabilitas pangan merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan. Pangan merupakan variabel determinan untuk menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu pemerintah saat itu menetapkan swasembada beras sebagai sasaran yang jelas dalam kebijakan ekonominya. Ketahanan pangan dibangun melalui kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan dengan sistem komando yang sangat ketat (sentralistik).

Era 1990 Indonesia masih menjadi negara produsen beras, namun tahun 2000 Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar (Krisnamurthi, 2003). Hal ini menandakan bahwa: (a) kemampuan pertanian Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin menurun. (b) Indonesia rentan akan rawan pangan, karena Indonesia tergantung pada suplai pangan dari negara lain. (c) padatnya jumlah penduduk Indonesia, sehingga kebutuhan akan pangan juga meningkat signifikan.

Status sebagai negara pengimpor beras sedikit demi sedikit dikurangi oleh Indonesia, karena pada tahun 2008 Indonesia berhasil mencukupi sendiri kebutuhan beras, dan secara perlahan mengurangi jumlah impor bahan pangan lainnya. Meski demikian, tidak mengurangi sikap kewaspadaan pangan, karena belum stabilnya kemampuan Indonesia mencukupi sendiri kebutuhan beras dan belum tercapainya memenuhi kebutuhan pangan non beras.

Kondisi inilah yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, pemerintah sebagai regulator, dan masyarakat petani sebagai pelaksana, serta masyarakat industri harus saling bahu membahu bagaimana mengelola dan mengatur segala bentuk regulasi yang berkaitan dengan pangan, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalan rawan pangan dalam kaca mata Islam telah menjadi pembicaraan yang tiada habisnya dalam Al-Qur'an. Karena Allah telah menciptakan alam ini sedemikian lengkap termasuk jaminan ketersediaan pangan bagi kehidupan manusia (Setyowati, 2009). Ada banyak ayat yang memaparkan

bagaimana Allah melimpahkan rizqi bagi makhluknya untuk mendukung keberlangsungan kehidupan mereka di bumi.

Oleh karenanya, apa yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia tentang ketersediaan berbagai bahan pangan ini, harus dikelola dan dimanaje dengan baik. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi keberlangsungan hidup manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.

Salah satu ajaran al-Qur'an terkait dengan pengelolaan bahan pangan dan ketahanan pangan adalah Surat Yusuf. Ajaran-ajaran al-Qur'an dalam surat Yusuf tersebut salah satunya menggambarkan bagaimana sebuah negara mengelola segala potensi pangannya untuk menciptakan ketahanan pangan serta ketersediaan pangan yang memadai.

KAJIAN TEORITIS

Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Dengan demikian, pangan mempunyai ruang lingkup yang luas, yakni pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan), perikanan, kehutanan, dan ekonomi pedesaan (Setyowati, 2009).

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan sebuah konsep yang pertama kali muncul pada Konferensi Pangan Dunia yang dilaksanakan pada 1974. (Winarno, 2011). Pada tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai "ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan, dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga". Pada 1992, *Food and Agricultural Organization* (FAO) mengeluarkan definisi Ketahanan Pangan, yaitu "situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif".

Menurut Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1996 Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai "Kondisi di mana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (*safety*), distribusi yang merata, dan kemampuan untuk membeli".

Undang-undang ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 yang mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai "Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau".

Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ketahanan pangan terdiri dari beberapa faktor, yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessability*), kestabilan (*stability*), dan keamanan (*safety*). Dengan demikian, kebijakan sebuah negara terhadap ketahanan pangan harus mempertimbangkan keempat faktor di atas. Pengambilan kebijakan yang keliru dalam ketahanan pangan akan berdampak pada terjadinya ketidakstabilan dalam pemerintahan.

Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002) menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa dan pengetahuan atau objek studi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti.

Penelitian ini mengkaji salah satu ayat dalam al-Qur'an yaitu Surat Yusuf ayat 47-49, yang menjadi salah satu dasar dari konsep manajemen ketahanan pangan di Indonesia dalam upaya meminimalisir bencana rawan pangan. Kalimat yang tertulis dalam surat Yusuf ayat 47-49,

Yang artinya:

(47) Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (49) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur. (QS. Yusuf 47-49)

Kalimat dalam surat Yusuf ayat 47-49 tersebut yang menjadi dasar untuk dipahami, dipikirkan dan dipersepsikan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan suatu negara. Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia. Selain itu, negara juga harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخَصِمُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

pokok dan pangan utama dari dalam negeri. Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negara tergadai pada negara lain. Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara. Ketergantungan pada impor juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis. Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistensi negara sebagai negara yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan.

Karena itu ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; (2) Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan Negara. Untuk memenuhi ketiga ajaran Islam mengenai ketahanan pangan tersebut, maka segala potensi yang ada harus dikerahkan untuk bersama-sama bekerja mewujudkan harapan tersebut. Nabi Yusuf melalui ajaran al-Qur'an dalam Surat Yusuf ayat 47-49 memberikan gambaran sebagai berikut (Bundamahyra, 2013).

Pertama, berdasarkan ramalan futuristik dari Nabi Yusuf tersebut selanjutnya diagendakanlah sebuah perencanaan (*planning*) jauh ke depan, yang matang untuk menghadapi bahaya kelaparan yang mungkin terjadi. Panen dan swasembada pangan yang diperoleh penduduk Mesir selama tujuh tahun diinventarisir untuk kepentingan konsumsi di masa yang akan datang. Upaya-upaya produktif untuk menjaga kestabilan produksi pangan agar seimbang dengan pertumbuhan penduduk pun dilakukan. Partisipasi aktif dari seluruh rakyat Mesir pun tampak dalam keadaan yang serba tidak pasti ini. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian rakyat Mesir berhasil melewati tantangan pangan yang melanda mereka. Bahkan rangkaian ayat selanjutnya pun menceritakan kepada kita bahwa bangsa Mesir mampu memberi bantuan tetangga-tetangga negeri lain yang kekurangan (QS. Yusuf: 58).

Kedua, faktor yang secara signifikan memberi kontribusi bagi efektifnya program pangan kerajaan Mesir tersebut adalah kepemimpinan yang luar biasa cerdas (*smart leadership*) dari seorang Nabi Yusuf AS. Dikisahkan bahwa setelah menceritakan ta'wil dari mimpi Sang Raja dan diundang ke istana, Nabi Yusuf AS menunjukkan kompetensi beliau sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi

bendahara negara yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan pangan pada waktu itu (QS. Yusuf: 55). Dalam ayat kelima puluh lima ini juga Nabi Yusuf AS memberi kriteria yang membuat dirinya layak untuk jabatan penting tersebut. Kriteria pertama adalah *hafidh* yang berarti mampu menjaga dan tidak menyia-nyiakannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Hal ini memang terbukti dengan keberhasilan beliau membawa Mesir tidak hanya aman dari bahaya kelaparan pada masa paceklik, tetapi sekaligus mampu memberikan bantuan pada negara tetangga.

Kriteria kedua yang diajukan oleh Nabi Yusuf as adalah *'alim* yang berarti memiliki kepandaian dan kemampuan intelektual. Hal ini penting mengingat pengaturan masalah suatu negara bukanlah pekerjaan ringan. Dibutuhkan semangat juang tinggi yang tidak kenal putus asa untuk mewujudkan cita-cita *baladatum thoyyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan dua kriteria inilah Nabi Yusuf kemudian memimpin badan urusan pangan negeri Mesir kala itu bersiap menghadapi bahaya kelaparan di musim kering. Melalui prediksi yang akurat akan kebutuhan pangan di masa datang, panen yang mencapai swasembada di tujuh tahun pertama disimpan untuk kepentingan masa depan. Hal ini terbukti efektif dan memberi hasil positif sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf AS mendapat kedudukan terhormat di kalangan bangsa Mesir makiinun amiin (QS. Yusuf: 54).

Interpretasi dari QS. Yusuf ayat 47-49 ini kalau diimplementasikan dalam kekinian di Indonesia adalah sebagai berikut (Iqbal, 2013):

Ayat ini mengungkap dua strategi sekaligus yaitu kegiatan menanam secara serius untuk waktu yang lama (7 tahun), dan strategi menyimpannya. Menyimpan gandum, padi dan sejenisnya dalam *'bulirnya'* adalah strategi untuk mempertahankan agar padi atau gandum tersebut awet, tidak rusak dan tetap bisa menjadi benih yang sempurna bila kelak akan ditanam kembali. Selama ini strategi ketahanan pangan yang ditempuh di negeri ini baru sebatas berusaha meningkatkan produksi bahan-bahan pangan yang kita butuhkan dan pada saat bersamaan mengurangi konsumsi bahan pangan utama yang kita impor. Inipun belum nampak hasilnya karena dari grafik di atas saja kita sudah langsung tahu konsumsi bahan pangan impor itu meningkat tajam dan bukan sebaliknya menurun.

Ketahanan pangan di Indonesia akan terwujud jika pemberdayaan terhadap petani dilakukan secara serius oleh pemerintah. Ada dua cara yang harus

dilakukan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan. *Pertama*, peningkatan skill petani. Pemerintah harus mengadakan pendekatan persuasif kepada para petani untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh petani di lapangan. Penanggulangannya pun akan mudah dicari oleh pemerintah sehingga tepat sasaran. Selain itu, pemerintah harus serius melakukan pengawasan terhadap petani. Bisa dengan memberikan penyuluhan secara berkala ataupun dengan memberikan informasi yang berkesinambungan tentang perkembangan pertanian yang ada di tanah air melalui lembaga pertanian pemerintah yang ada di daerah masing-masing. Sehingga para petani bisa mengikuti perkembangan yang ada. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi meningkatkan *skill* petani di Indonesia.

Kedua, adanya regulasi yang berpihak kepada petani. Selama ini seolah-olah ada kontradiksi yang sangat mencolok di tubuh pemerintahan kita, yaitu antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Di satu sisi Kementerian Pertanian mendorong adanya peningkatan pangan melalui pemberdayaan petani, sehingga petani sendirilah yang menikmati hasil pertaniannya. Akan tetapi, hal itu dirusak oleh Kementerian Perdagangan yang membuat kebijakan impor pangan dari luar negeri, sehingga akibatnya harga pangan di dalam negeri jatuh drastis. Yang pada akhirnya pangan petani menjadi tidak laku. Sehingga menjadikan petani malas untuk bertani.

Ketiga, pembiayaan perbankan. perbankan syariah sangat mendukung sekali terhadap peningkatan pertanian di Indonesia. Maka dari itu, harus ada kesadaran dari para petani bahwa pada saat sekarang ini sudah ada perbankan yang benar-benar berpihak kepada petani, yaitu perbankan syariah dengan skim pembiayaan Salam.

Adanya keseriusan pemerintah terhadap sektor pertanian akan berdampak pada kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan pemerintah pun harus menargetkan kapan akan melakukan swasembada pangan seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintahan orde baru terhadap swasembada beras. Apabila solusi ketiga di atas benar-benar dijalankan oleh pemerintah, maka ketahanan pangan dalam negeri bisa diatasi. Dan bahkan Negara kita akan mampu melakukan swasembada pangan ke luar negeri. (Syaifullah, 2013)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan atas penelitian yang didasarkan pada interpretasi surat Yusuf ayat 47–49 tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ajaran Islam sudah sangat jelas bagaimana memberikan aturan dan cara dalam berbagai kehidupan, termasuk bagaimana mengelola pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sehingga terciptanya ketersediaan pangan yang memadai. (2) Ketahanan pangan akan tercapai jika pemerintah dengan serius memberdayakan dan menegakkan aturan-aturan atau regulasi yang berpihak pada petani. (3) Ketahanan pangan dapat terwujud jika ada perencanaan (*planning*) yang fokus untuk mewujudkan agenda-agenda menuju pada pengelolaan pangan. Serta kualitas kepemimpinan yang memenuhi syarat *hafidh* dan *'alim* sebagai pejabat yang memiliki otoritas untuk mengelola sektor pangan tersebut.

Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar (baik kualitas maupun kuantitas) untuk menjadi yang terbaik dalam berperilaku dan bersikap demi mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Saran

Adapun saran yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah dengan sungguh-sungguh melalui aturan dan regulasi yang jelas untuk mendukung petani dan sektor pertanian. Misalnya, bantuan pendanaan dari sektor perbankan. (2) Meneguhkan kembali keadaan BULOG mulai dari tingkatan pemerintah pusat sampai pemerintah Kota/Kabupaten. (3) Pemerintah harus memiliki *political will* yang kuat dan tegas dalam rangka mewujudkan kembali swasembada pangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, D. 2008. Pangan Sebagai Gerakan Sosial. *Basis*. No. 05–06 Mei - Juni 2008, hal. 57.
- Bundamahyra. 2013. *Ketahanan Pangan di Indonesia dari Perspektif Islam*. Diakses, 8 Mei 2013.
- Hermawan, S. 2012. Tinjauan Keadilan Sosial terhadap Hukum Tata Pangan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012, hal. 377–569.
- Krisnamurthi, B. 2003. Perum Bulok dan Kebijakan Pangan Indonesia: Kendaraan Tanpa Tujuan. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tahun II, No. 7, Oktober.

- Iqbal, M. 2013. <http://www.hidayatullah.com/kolom/ilahiyah-finance/read/2013/05/10/3061/ketahanan-pangan-a-la-nabi-yusuf-alaihi-salam.html>. Diakses, 8 Mei 2014.
- Margino, S. 2004. Ketersediaan Pangan Guna Mendukung Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional. Dalam Sunyoto Usman (ed). *Politik Pangan*. hal 48-49. Yogyakarta: CIREd.
- Rosario, J., del . 2007. Modul Tentang Kedaulatan Pangan, Panduan Pelatihan untuk Kedaulatan Pangan. Penang: PAN AP. hal. 7.
- Setyowati, H.N. 2009. Hadis tentang Keutamaan Bercocok Tanam (Studi *Ma'ani al Hadis*). *Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN SUKA Yogyakarta*. tidak diterbitkan.
- Syaifullah, H. 2004. <http://inspirasibangsa.com/perbankan-syariah-dan-optimalisasi-sektor-pertanian/>. Diakses, 8 Mei 2014.
- Winarno, B. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. hal. 187. Yogyakarta: CAPS.